

SUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SOLO, PENDANAAN PEMBANGUNAN 2025 DEFISIT Rp700 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/81/images/1705490291241-1/2qq7w9fpv5glvr3.jpeg>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO– Biaya untuk menjalankan program pembangunan Kota Solo mencapai Rp2,7 triliun pada 2025. Sedangkan pendapatan daerah sekitar Rp2 triliun. Ada selisih kekurangan pendanaan sekitar Rp700 miliar.

Hal itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solo 2025 di Harris Hotel Solo, Rabu (17/1/2024). Hadir para pemangku kepentingan, antara lain pihak birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media.

Forum itu berlangsung pukul 09.50 WIB sampai pukul 12.00 WIB. RKPD merupakan salah satu tahapan pembangunan. Pemkot Solo memakai sejumlah pendekatan dalam perencanaan yaitu top-down planning dan bottom-up planning.

Selain RKPD ada forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan sampai nasional. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa membuka forum RKPD.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo Gatot Sutanto menjelaskan rekapitulasi pagu rancangan awal RKPD 2025 senilai Rp2.72.156.855.970,44.

Dinas Pendidikan Kota Solo menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pagu anggaran terbanyak untuk rencana pembangunan yakni Rp585.204.987.000.

Kemudian Dinas Kesehatan Kota Solo Rp505.059.562.929. Dinas Perdagangan Kota Solo senilai Rp190.467.080.268. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo justru pagu anggarannya terkecil, yakni Rp7.259.440.000.

Sementara itu, proyeksi pendapatan Kota Solo 2025, yakni bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah Rp592 miliar, retribusi daerah

Rp85.572.662.482, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.781.755.883, dan lain-lain berupa PAD yang sah Rp144.708.143.254.

Kemudian ada pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.141.136.366.000 dan pendapatan transfer antar daerah Rp85.641.560.246.

Gatot menjelaskan sejumlah isu infrastruktur kota, yakni keterbatasan lahan untuk mengembangkan layanan perkotaan; tantangan memenuhi target ruang terbuka hijau (RTH) 20%.

Kemudian masalah ketertiban dan perubahan guna lahan yang tidak sesuai peruntukannya, misalkan pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan ekonomi. Ada 3.447 rumah tidak layak huni di Kota Solo 2023 yang perlu ditangani; kolaborasi pembangunan terkait isu stunting, kawasan kumuh, dan kemiskinan

Dukungan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terhadap 17 prioritas pembangunan Kota Solo; pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata.

“Selanjutnya pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata,” jelas Gatot.

Sedangkan isu pengembangan wilayah, kata Gatot, yakni pengembangan kerja sama dengan daerah sekitar di Soloraya meliputi prasarana dan sarana permukiman di perbatasan. Dan kerja sama sektor sumber daya air, pertanian, pemakaman, RTH, persampahan, drainase.

Pengembangan interkoneksi antara pusat dan sub pusat kegiatan, pemanfaatan moda transportasi publik, pengembangan jalur kereta api (KA Bandara dan KA rute Wonogiri), pengembangan angkutan barang, jalur lingkaran kota khususnya sisi selatan.

Kemudian pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata.

Perkembangan kawasan perkotaan Solo melebihi batas administrasi kota dan keterpaduan rencana tata ruang kota dengan kawasan kabupaten di sekitar kota.

Kepala Bapenda Kota Solo Tulus Widajat menjelaskan butuh upaya tindak lanjut untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah supaya realistis. Belanja daerah menyesuaikan pendapatannya.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/susun-rancangan-awal-rkpd-solo-pendanaan-pembangunan-2025-defisit-rp700-miliar-1842702>, “Susun Rancangan Awal RKPD Solo, Pendanaan Pembangunan 2025 Defisit Rp700 Miliar”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://www.rri.go.id/daerah/520245/konsultasi-rancangan-awal-rkpd-kota-surakarta-tahun-2025>, “Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kota Surakarta Tahun 2025”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan :

- Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.¹
- Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- KPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- BAPPEDA melakukan penyusunan Rancangan RKPD paling lambat minggu keempat bulan Maret. BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. rancangan RKPD; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/apa-perbedaan-antara-rpjpd-rpjmd-dan-rkpd/>